

## **PENGHAPUSAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF GURU SMA DI KOTA TEBING TINGGI**

Ayang Sari, Syahnan Daulay, Yola Yuliani Putri, Pita Epriani

Mahasiswa Prodi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

surel: [ayangsari17@gmail.com](mailto:ayangsari17@gmail.com) , [yolackp23@gmail.com](mailto:yolackp23@gmail.com) , [pitaepriani@gmail.com](mailto:pitaepriani@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perspektif guru SMA kota Tebing Tinggi terkait penghapusan ujian nasional (UN) pada tahun 2021 dan memperoleh gambaran urgensi penghapusan ujian nasional (UN) pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode survei penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner terbuka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada perspektif guru SMA se-Kota Tebing Tinggi terhadap penghapusan ujian nasional (UN) pada tahun 2021 yang akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar kepada sampel guru SMA se-Kota Tebing Tinggi menunjukkan perspektif kontra dengan keputusan Kemdikbud sebanyak 22,22%. Mereka tidak setuju dengan keputusan yang diambil Kemdikbud untuk menghapus ujian nasional (UN). Sedangkan, sisanya sebanyak 77,77% perspektif pro guru menyambut baik dengan menyetujui kebijakan Kemdikbud tersebut. Ketika guru diberi pertanyaan mengenai kesiapan untuk menghadapi format asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, perspektif pro guru meningkat menjadi 94,44%. Terjadi kenaikan angka sebesar 16,74% ketika guru dihadapkan pertanyaan mengenai kesiapan menghadapi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

*Kata Kunci: pro kontra, penghapusan ujian nasional, guru SMA Kota Tebing Tinggi*

### **PENDAHULUAN**

Evaluasi pendidikan adalah salah satu komponen utama yang tidak terpisahkan dengan komponen pendidikan. Namun, tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat ukur evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Diperlukan alat ukur yang relevan agar hasil pengukuran tepat. Karena jika tidak hasilnya bisa tidak tepat bahkan salah sama sekali.

Evaluasi pendidikan juga merupakan ranah teknologi pendidikan.<sup>4</sup> Ranah ini tentu tidak terpisahkan dengan ranah lain yaitu desain (design), pengembangan (development), penggunaan (utilization) dan pengelolaan (management). Oleh karena itu dalam menentukan sebuah mekanisme evaluasi atau alat ukur diperlukan ahli dalam melihat ranah yang lain sehingga dapat dihasilkan hasil belajar atau potret “nilai” peserta belajar secara komprehensif. Seperti yang tertera dalam Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan”. Oleh karena itu, setiap langkah evaluasi hendaknya didasarkan pada prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, dengan demikian, setiap evaluasi adalah upaya untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

Hasil evaluasi merupakan indikator keberhasilan terhadap pembelajaran terhadap pengajar dan peserta didiknya. Hal ini berlaku pada suatu kelas pembelajaran, tingkat sekolah,

tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional. Hasilnya menggambarkan tingkatan yang diwakilinya. Saat ini evaluasi yang dilakukan secara nasional untuk melihat ketercapaian pendidikan nasional adalah Ujian Nasional (UN) dalam bentuk tes objektif.

Sejak tahun pembelajaran 2002-2003 alat evaluasi hasil belajar akhir jenjang pendidikan di Indonesia diganti menjadi ujian akhir nasional (UAN). Namun, pada tahun 2005 namanya dipersingkat menjadi ujian nasional (UN). Keberadaan dan penerapan alat evaluasi hasil belajar akhir jenjang pendidikan disebut ujian nasional (UN), menuai berbagai polemik, pro kontra dan kontroversi yang senantiasa berlarut. Salah satu kenyataan yang menunjukkan hal itu adalah dari penelitian sebelumnya oleh Muntholi'ah dengan judul "Ujian Nasional, Dulu, Kini dan yang Akan Datang: Tinjauan Normatif". Mengatakan bahwa pada UN 2004 ini terdapat kontroversi tentang Konversi Nilai UAN yang dianggap merugikan siswa-siswa yang pandai dan lebih menguntungkan siswa yang kurang pandai.

Data lain juga ditemukan dari penelitian Fajri Ismail dengan judul "Pro Kontra Ujian Nasional". Berdasarkan penelitiannya ditemukan pernyataan bahwa Sejak 2003 sampai saat ini kajian tentang perlu tidaknya pelaksanaan UN masih menjadi diskursus yang belum menemukan titik temunya.

Perspektif pro kontra terhadap kebijakan Ujian nasional terus terjadi hingga saat ini. Hingga pada akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim secara resmi mengatakan bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (11/12/2020). Ujian nasional (UN) pada tahun 2021 akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Menurutnya, Asesmen tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti selama ini diterapkan dalam ujian nasional (UN), melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

Pernyataan Mendikbud tentang kebijakan menghapus ujian nasional (UN) tersebut tentu mendapatkan respon yang sangat bervariasi. Polemik ujian nasional yang berlangsung 18 tahun lamanya akhirnya selesai dengan kebijakan Kemdikbud yang dipublikasi pada tahun 2019 silam. Seperti pernyataan pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan, Andreas yang mengatakan agar kebijakan yang diambil Kemdikbud harus benar-benar gamblang agar tidak menuai pandangan masyarakat tentang ganti menteri ganti kebijakan (CNN Indonesia/12/12/2019). Selain itu, banyak guru yang tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana pelaksanaan alat ukur asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tersebut. Dan tidak sedikit guru yang masih meragukan apakah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter adalah alat ukur yang tepat untuk mengukur hasil belajarsiswa.

Hal penghapusan UN menjadi masalah baru pada pendidikan khususnya bagi guru. Hal-hal yang dapat menjadi masalah tersebut, yakni 1) adanya perspektif guru-guru yang berbeda, yakni pro ataupun kontra dengan kebijakan penghapusan UN yang diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, 2) adanya ketidaksiapan guru dalam menjalankan kebijakan baru, dan 3) keraguan kualitas alat ukur asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perspektif Pro Kontra Terhadap Kebijakan Penghapusan UN**

Sejak Kemdikbud pertama kali secara resmi menyamapiakan kebijakan penghapusan UN pada dimulai tahun 2021 telah menuai banyak kontroversi dan perbincangan. Kebijakan tersebut langsung meramaikan mesin pencarian Google. Setidaknya ada lebih dari 20 berita yang mengangkat hal tersebut menjadi materinya.

Tawaran konsep pendidikan yang lebih memerdekakan sekolah dan guru ini ditanggapi beragam. Guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah SMPN 30 Jakarta Utara, Irwan Mainur misalnya mengaku sebagai pengajar dirinya telah terbiasa dengan kebijakan pendidikan yang sering sekali

bergonta-ganti. Namun, menurutnya, pihak guru dan sekolah perlu lebih disiapkan agar bisa menerapkan konsep Pendidikan Belajar Merdeka yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim ini secara benar. Tambahnya, "Walau perubahan itu katanya meringankan dan memerdekakan guru dalam mengajar, namun pada praktiknya akan sangat merepotkan karena guru dituntut untuk berkreasi, tapi di sisi lain ada banyak tugas administrasi yang harus dikerjakan dan enggak ada habis-habis." Pernyataannya dapat dimaknai seperti siap tapi tidak siap. "Sekolah juga harus membuat penilaian sendiri, membuat soal itu bukan perkara mudah. Itu enggak boleh sembarangan, enggak boleh sekadar bikin soal, tapi harus ada sisi psikologi, guru harus kreatif mencari cara yang bisa menggelitik nalar siswa." "Khawatirnya, nanti kalau guru tidak siap, jadi ya tinggal cari-cari soal aja untuk penilaian dan jatuhnya cuma jadi formalitas. Dampak negatifnya bisa membuka peluang permainan jual beli soal lagi," katanya lagi.

Sementara pendidik yang lain mengaku gembira dengan kebijakan pendidikan yang baru dirilis Mendikbud baru ini. Yuli Pinasti, founder Sekolah Alam Kampung Sawah di Depok, Jawa Barat menyebut ujian nasional memang tepat dihapuskan. "Menurut saya ini kebijakan yang sangat tepat. Ujian Nasional yang diselenggarakan selama ini hanya mengukur kemampuan akademis saja, sementara kemampuan yang lain tidak dihargai. Padahal setiap anak memiliki potensi unik masing-masing," tutur Yuli dilansir dari Vivanews, Kamis (12/12/2019). "Dan jika mengacu ke UU Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 3, fungsi pendidikan itu kan agar setiap orang mampu mengembangkan potensi uniknya, bukan diseragamkan untuk menjadi sama semua yang tercermin di sistem UN selama ini," tambahya.

#### **Alasan Penghapusan UN**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN). UN pada tahun 2021 akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

Perubahan kebijakan ujian nasional yang akan diganti dengan asesmen tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, antara lain guru, siswa, dan orang tua. Menurut Mendikbud, selama ini materi ujian nasional terlalu padat sehingga fokus siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar. Hal ini menimbulkan beban stres pada siswa, guru, maupun orang tua, karena ujian nasional justru menjadi indikator keberhasilan belajar siswa sebagai individu. "Padahal tujuan UN adalah untuk melakukan asesmen terhadap sistem pendidikan secara nasional. Jadi UN selama ini hanya menilai satu aspek, yaitu kognitif saja, bahkan tidak semua aspek kognitif dites. UN lebih ke penguasaan materi, belum menyentuh karakter siswa lebih holistik," ujar Mendikbud. Ia menambahkan, secara nasional, pendidikan memang membutuhkan tolok ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur itulah yang akan diubah melalui pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

#### **Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter**

Asesmen Kompetensi Minimum dilakukan tidak berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Menurut Mendikbud literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dua hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar Survei karakter,

dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Menurutnya, selama ini secara nasional data pendidikan yang dimiliki berupa data kognitif. "Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila benar-benar dirasakan oleh siswa di Indonesia. Kita akan mengadakan survei, misalnya bagaimana implementasi gotong royong, apakah kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan. apakah masih ada bullying? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolah dan buat kami diKemendikbud".

Survei karakter tersebut akan dijadikan tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik atau feedback ke sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas pancasila. Waktu pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan dilakukan di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir jenjang seperti pada pelaksanaan ujian nasional. Mendikbud mengutarakan setidaknya ada dua alasan mengapa pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang. "Pertama, kalau dilakukan di tengah jenjang akan bisa memberikan waktu untuk sekolah dan guru dalam melakukan perbaikan sebelum anak lulus di jenjang itu. Kedua, karena dilaksanakan di tengah jenjang, jadi tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa, sehingga tidak menimbulkan stres pada anak-anak dan orang tua akibat ujian yang sifatnya formatif,"ujarnya.

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan Kemendikbud bekerja sama dengan organisasi pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Langkah tersebut diambil agar asesmen memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. "Kita bergotong royong untuk menciptakan kompetensi lebih baik bagi anak-anak kita," tutur Mendikbud.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini juga dilaksanakan pada September tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah guru SMA di kota Tebing Tinggi adalah berjumlah 361 orang. Adapun cara untuk menarik sampel random atau sampel acak pada penelitian ini menggunakan cara undian. Sampel penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi. Jika populasi penelitian ini adalah 361 guru, maka 10% dari populasi adalah 36 guru. Penelitian ini menggunakan metode survei penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner terbuka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang terlampir dalam angket dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas di lapangan

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pandangan atau perspektif guru terkait dengan kebijakan penghapusan UN oleh pemerintah. Perspektif guru yang dimaksud dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Terdapat 8 dari 36 guru tidak setuju dengan penghapusan format Ujian Nasional yang akan dimulai pada tahun 2021. Sedangkan 28 guru lainnya setuju akan hal tersebut.

Terdapat 5 dari 36 guru tidak mengetahui tentang keputusan penghapusan UN yang akan dimulai pada tahun 2021. Terdapat pula 1 guru baru menegtahui hal tersebut. Sementara sisanya yaitu, 30 guru sudahmengetahui.

Terdapat 9 guru merasa terdapat kelemahan dan ancaman terhadap keputusn penghapusan UN yang dimulai tahunn 2021. Sedangkan sisanya berjumlah 27 guru tidak merasa demikian.

Terdapat 13 guru yang tidak mengetahui tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dan 13 gurumengetahuinya.

Terdapat sebanyak 34 guru yang tidak mendapatkan sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan hanya 2 dari seluruh sampel guru yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Terdapat 15 guru yang tidak terdapat keunggulan dengan diberlakukannya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sementara sisanya sebanyak 21 guru berpendapat bahwa dengan diberlakukannya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter terdapat keunggulan.

Terdapat 10 guru bidang studi yang khawatir dengan format baru (Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter) yang sedang disusun Kemdikbud. Sementara 16 guru bidang studi tidak merasademikian.

Terdapat 33 guru yang siap menjalankan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter jika dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan, 3 guru lainnya merasa tidaksiap.

Terdapat 2 guru yang bersikap tidak setuju terhadap kebijakan penghapusan UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sementara, 34 guru lainnya setuju dan berusaha menerima keputusan Kemdikbud.

Terdapat 34 guru yang memberi tanggapan positif, sementara 2 guru lainnya meminta Kemdikbud meninjau ulang keputusan tersebut.

Selama 18 tahun ujian nasional (UN) menjadi standar hasil belajar siswa sejak diberlakukan tahun pembelajaran 2002/2003 tentu tidak mudah mengambil keputusan untuk menghapus dan atau menggantinya. Sejak tahun 2003 kebijakan Ujian Nasional tersebut sudah menuai banyak kontroversi apalagi terdapat keputusan penghapusan ujian nasional (UN) tersebut. Semakin banyak pandangan pro dan kontra mengenai keputusan Mendikbud Nadiem Makarim ini.

Perspektif pro kontra terkait kebijakan Kemdikbud untuk menghapus ujian nasional (UN) sebagai standar hasil akhir belajar siswa tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar kepada sampel guru SMA se-Kota Tebing Tinggi sebanyak 22,22% guru kontra dengan keputusan Kemdikbud. Mereka tidak setuju dengan keputusan yang diambil Kemdikbud untuk menghapus ujian nasional (UN). Sedangkan, sisanya sebanyak 77,77% guru menyambut baik dengan menyetujui kebijakan Kemdikbud tersebut.

Hasil angket menunjukkan terdapat 16% guru tidak mengetahui tentang keputusan penghapusan UN yang akan dimulai pada tahun 2021. Hal ini tentu menjadi catatan Kemdikbud. Hal itu dikarenakan per September 2020 penelitian ini dilakukan, masih terdapat 16,66% guru SMA Kota Tebing Tinggi yang tidak mengetahui adanya kebijakan penghapusan UN pada tahun 2021, sedangkan tinggal menghitung bulan akan dilaksanakan kebijakan baru tersebut.

Setidaknya, terdapat 75% guru bidang studi di SMA se-Kota Tebing Tinggi merespon positif kebijakan Kemdikbud dan tidak merasa terdapat kelemahan atau terancam dengan keputusan penghapusan UN tahun 2021 tersebut. Tetapi, 25% lainnya berpendapat terdapat kelemahan dan ancaman jika ujian nasional (UN) dihapuskan. Ada yang berpendapat keputusan tersebut akan berimbas pada berkurangnya semangat anak untuk memahami pelajaran lebih dalam. Karena tidak ada lagi ujian nasional yang menjadi pemicu bagi mereka untuk semangat belajar. Senada dengan pendapat sebelumnya, guru menilai adanya kelemahan karena selama ini ujian nasional (UN) digunakan sebagai tolok ukur kemampuan siswa selama dia belajar di sekolah. Selain itu, ada guru yang setuju jika ujian nasional (UN) dihapuskan tetapi melihat terdapat kelemahan jika hal itu terjadi, yakni guru tidak bisa melihat secara jelas hasil ulaian yang dicapai anak-anak selama 3 tahun dalam bentuk hasil ujian akhir. Ada pula yang berpendapat bahwa akan berimbas pada mata pelajaran Fisika yang tidak akan menjadi favorit lagi. Ditambah lagi terdapat guru yang merasa terancam karena belum pandai menggunakan format asesmen kompetensi kemampuan dan survei karakter. Dan ada yang ikut terancam dengan menyatakan bahwa penghapusan ujian nasional (UN) akan menyebabkan banyak lembaga pendidikan gulung tikar.

Selain kelemahan dan ancaman yang ditimbulkan akibat kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) tahun 2021, terdapat 58,33% guru SMA se-Kota Tebing Tinggi menilai asesmen

kompetensi kemampuan dan survei karakter sebagai pengganti ujian nasional (UN) juga memiliki keunggulan. Keunggulannya yaitu (1) asesmen kompetensi kemampuan (AKM) dinilai dapat meningkatkan pemikiran logis, kritis dan pola penilaian karakter siswa, (2) asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan lebih efektif menilai kemampuan peserta didik dalam bernalar literasi dan numerasi yang mana kemampuan tersebutlah yang diaplikasikan dalam mengikuti perkembangan kehidupan tanpa mengecualikan penilaian karakter seseorang. Sementara 27,78% guru merasa khawatir dengan kebijakan penghapusan ujian nasional (UN). Mereka merasa khawatir karena belum pandai mengaplikasikannya.

Tahun 2021 yang tinggal hitungan bulan tentu menjadi waktu-waktu penting Kemdikbud dalam menyiapkan segala hal guna menyukseskan pembaruan yang tengah dirancang. Kemdikbud harus bekerja ekstra jika tidak ingin menuai banyak kritik dan keberhasilan yang optimal. Pasalnya, pada kenyataan yang peneliti dapatkan di lapangan masih terdapat 36,11% guru SMA Kota Tebing Tinggi yang belum mengetahui format asesmen kompetensi kemampuan dan survei karakter. Ditambah lagi seluruh sampel tidak mendapatkan sosialisasi mengenai perubahan format ujian nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi kemampuan dan survei karakter. Setidaknya, 94,44% guru SMA se-Kota Tebing Tinggi tidak mendapatkan sosialisasi terkait apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan asesmen kompetensi kemampuan dan survei karakter itu. Tidak heran jika guru merasa khawatir dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena bekal yang didapatkan dari Kemdikbud tidak menyeluruh. Tentu menjadi catatan penting bahwa guru sebagai pelaksana format yang sedang dirancang tidak mengetahui secara jelas dan tuntas apa yang akan mereka hadapi. Ini merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh karena akan berdampak negatif pada hasil yang ingin dicapai.

Terdapat 77,77% guru SMA Kota Tebing Tinggi yang setuju, sementara 22,22% lainnya tidak. Hal ini menunjukkan jika dinilai berdasarkan jumlah persentasenya guru SMA Tebing Tinggi setuju terhadap keputusan Kemdikbud tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada pertanyaan mengenai kesiapan guru menghadapi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter menjadi 94,44% guru SMA se-Kota Tebing Tinggi berusaha menerima kebijakan Kemdikbud.

Terjadi kenaikan angka sebesar 16,74% dengan penuh harapan agar mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu mengalami peningkatan jumlah guru yang pro terhadap kebijakan tersebut. Beberapa akhirnya memilih menerimanya. Berdasarkan penelitian ini juga, guru berharap Kemdikbud melakukan sosialisasi dan format yang tengah disusun agar menambah bekal pemahaman guru. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini juga diharapkan dapat memperbaiki kelemahan ujian nasional (UN). Namun, tidak dengan 5,5% guru lainnya. Mereka tetap berharap kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) ditinjau ulang. Guru-guru yang kontra dengan kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai instrumen untuk mengukur pola pikir dan karakter siswa namun dengan tetap menjalankan ujian nasional, sehingga keduanya ada.

## **KESIMPULAN**

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter merupakan pengganti ujian nasional (UN) yang resmi akan dimulai pada tahun 2021. Kebijakan tersebut mendapatkan respon positif dan negatif dari berbagai kalangan khususnya guru. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada pertanyaan mengenai kesiapan guru menghadapi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter menjadi 94,44% guru SMA se-Kota Tebing Tinggi berusaha menerima kebijakan Kemdikbud. Terjadi kenaikan angka sebesar 16,74% dengan penuh harapan agar mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu mengalami peningkatan jumlah guru yang pro terhadap kebijakan tersebut. Beberapa akhirnya memilih menerimanya. Dan dapat terlihat urgensi penghapusan ujian nasional (UN) ada. Berdasarkan penelitian ini juga, guru

berharap Kemdikbud melakukan sosialisasi dan format yang tengah disusun agar menambah bekal pemahaman guru. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini juga diharapkan dapat memperbaiki kelemahan ujian nasional (UN). Namun, tidak dengan 5,5% guru lainnya. Mereka tetap berharap kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) ditinjau ulang. Guru-guru yang kontra dengan kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai instrumen untuk mengukur pola pikir dan karakter siswa namun dengan tetap menjalankan ujian nasional, sehingga keduanya ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Furqon dk.,2009 dalam Notodiputro,Khairil Anwar. 2012. Ujian Nasional:Sarana UntukMembangun Karakter Bangsa. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gultom, Syawal. Ujian Nasional Sebagai Wahana Evaluasi Pengembangan Pendidikan Karakter Gunadi H. Sulisty. Ujian Nasional (UN): Harapan, Tantangan, dan Peluang WACANA VOL. 9 NO. 1, APRIL 2007 (79—106)
- Ismail,Fajri. 2015. Pro Kotra Ujian Nasional. AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 7, Nomor 2, September 2015, 301-324.
- Ki Supriyoko,2006 dalam Notodiputro, Khairil Anwar. 2012. Umjian Nasional:Sarana Untuk Membangun Karakter Bangsa. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nadwa. 2013. Ujian Nasional, Dulu, Kini dan yang Akan Datang: Tinjauan Normatif Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7, Nomor 1
- Nashir, M. Fuad. Ujian Nasional 2007: Antara Kuasa Negara dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Skripsi IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA. Hal 51.
- Setiadi, Hari. Dampak Ujian Nasional Pada Karakter Bangsa. Jurnal. Bangsa. hal 2. dan hal 5.
- Tilaar, H. A. R. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 109-110.





THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY